

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Budi Agus Riswandi. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fence M. Wantu. 2011. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hoffman, Mariam Darus Badruzaman. 2005. *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumni, Bandung.
- M. Khozim. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung, Nusa Media.
- M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang undang No 19 tahun 1992*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta system Peradilan Pidana*. B.P Undip, Semarang.
- Philippus M. Hadjon. 2001. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pegadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Salim HS dan Erlies SN. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan ke -1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Suyud Margono. 2003. *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta.

Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

B. Jurnal/Tesis

Dhils Noviades, Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Imu Hukum*, 2013, Vol 4 No 1, Universitas Jambi.

Fithriatus Shalihah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM, *UIR Law Review* Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017.

Imam Lukito, Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau) (*The Roles of Regional Government in Promoting Potential Geographical Indications (Study on the Province of Kepulauan Riau)*), *JIKH* Vol. 12 No. 3 November 2018 : 313 – 330.

Nita Anggraeni, “Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional”, *Tesis* pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, 2005.

Nizar Apriansyah, “Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah (*Protection of Geographical Indications within the Scope of Improvement of Regional Economy*)”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 4, Desember 2018: 525 – 542.

Ubaidillah, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang Undang Merek Di Indonesia”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2012.

Workshop "Indikasi Geografis Di Indonesia" *IPR Media Depkumham*, Vol II / 1 April 2004.

Yeti Sumiyati, dkk, Kajian Yuridis Sosiologis mengenai Indikasi Geografis sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol 24 No 1, 2008, Universitas Islam Bandung.

Yetniwati, Meriyarni, Suhermi, Penerapan Norma Perlindungan Kerja Dalam Perjanjian Kerja *Outsourcing* (Alih Daya) Pada Perusahaan Perbankan Di Kota Jambi. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 2015.

Winda Risna Yessiningrum, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual *Legal Protection On Geographical Indication As A Part Of Intellectual Protection Rights*”, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan* Vol III, Nomor 7 April 2015.

Wizna Gania Balqis dan Budi Santoso, “Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

C. Kamus

Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

D. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

..... *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Thn 2014. LN Tahun 2014 sebagai revisi *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 32 Thn 2004. LN Tahun 2004 Nomor 125.

....., *Undang Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*. UU Nomor 20 Tahun 2016.

....., *Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis*. PP Nomor 51 Tahun 2007.

E. Internet

Asep Safaat, *Badan Hukum: Pengertian dan Teori Teori Badan Hukum*, <https://asepsafaat.wordpress.com>, tanggal akses 24 Januari 2020.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I,
Pengenalan Indikasi Geografis,

<https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>, tanggal akses 04 Mei 2020.

Hadjon, *Status Hukum, Perlindungan Hukum*, diakses melalui support@statushukum.com, tanggal 03 Mei 2020.

Nita Anggraeni, *Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional*,
<https://media.neliti.com/media/publications/57822-ID-perlindungan-terhadap-indikasi-geografis.pdf>, tanggal akses 18 Maret 2020.